BAB I
PENDAHULUAN

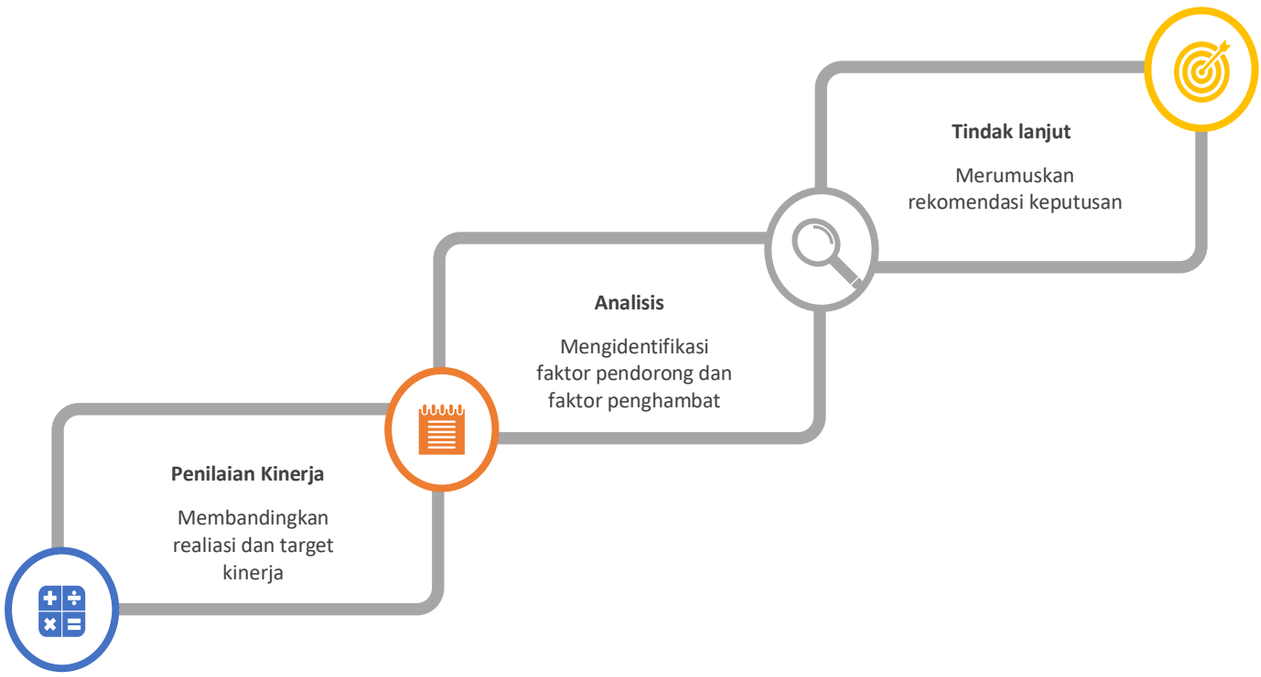
I.1. Latar Belakang

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah merupakan suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah, serta menilai realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Untuk mengetahui pencapaian target kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, perlu dilakukan evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Tribulan II bulan April s/d Juni , melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2025 guna menjamin rencana yang telah ditetapkan dapat mencapai target kinerja tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 diharapkan diperoleh data dan informasi penilaian target kinerja tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah. Dari penilaian kinerja tersebut dapat diidentifikasi faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja, serta merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja, dengan kerangka evaluasi sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Evaluasi Renja Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, diolah.

Dengan demikian hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tribulan II Tahun 2025 dapat memberikan gambaran efektifitas penetapan rencana, relevansi, dampak serta keberlanjutan program pembangunan daerah terhadap permasalahan dan isu penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta masukan perbaikan kebijakan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah di masa yang akan datang melalui umpan balik dan *lesson-learned* peningkatan akuntabilitas kinerja.

I.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2022.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2022.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakan evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah menilai capaian target kinerja target kinerja tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

Tujuan dilaksanakan evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah:

1. Mengidentifikasi factor- faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja.
2. Merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja

I.4. Sistematika Penulisan

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 disajikan dalam sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN, menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan, dan metode evaluasi Renja Perangkat Daerah.
2. BAB II CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2025 menjelaskan capaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, serta capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah.
3. BAB III FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA, menjelaskan faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, serta faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah
4. BAB IV PENUTUP, menguraikan kesimpulan dan tindak lanjut.

I.5. Metode Evaluasi Renja Perangkat Daerah

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 menggunakan metode evaluasi pengukuran kinerja dengan pendekatan *gap analysis*, metode ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja (apa yang sudah dicapai) dengan target kinerja (apa yang harus dicapai), perbandingan tersebut merupakan rasio capaian target kinerja yang dinyatakan dalam % (persentase). Dari keseluruhan capaian target kinerja dilakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

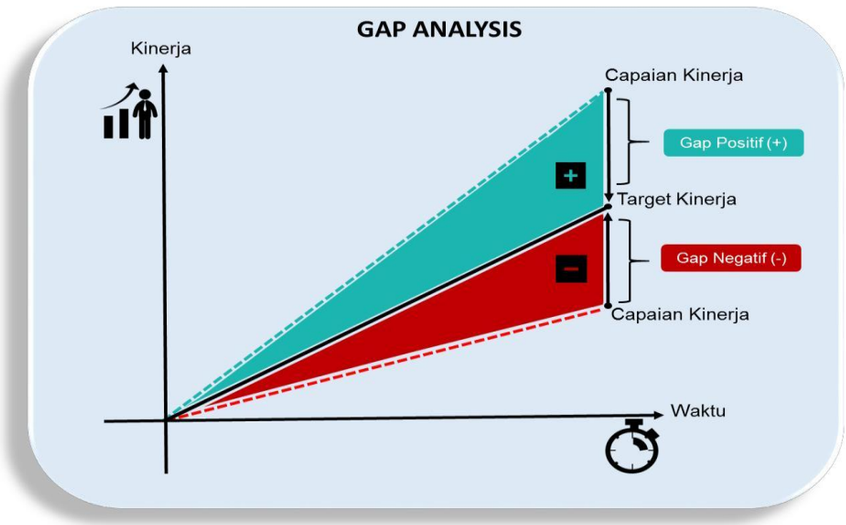
No.	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Capaian Kinerja
1.	≥ 91%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal penilaian kinerja.
2. Hasil sedang, gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
3. Hasil rendah dan sangat rendah, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Pendekatan *gap analiysis* dalam evaluasi pengukuran kinerja ini membandingkan antara capaian kinerja dengan target kinerja. *Gap* dapat terjadi apabila capaian kinerja berbeda dengan target kinerja, atau hasil yang dicapai selama pelaksanaan berbeda dengan hasil yang diharapkan dalam perencanaan, sebagaimana tergambar berikut:

Gambar 2. *Gap Analysis* Antara Capaian Kinerja Dengan Target Kinerja



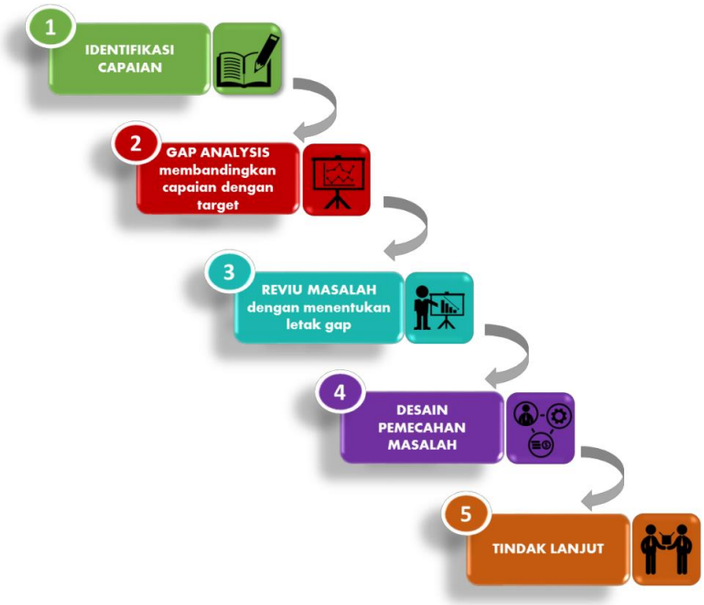
Gap antara capaian kinerja dengan target kinerja dapat bernilai positif (+) maupun negatif (-). *Gap* bernilai positif (+) jika capaian kinerja lebih besar dari target kinerja, sebaliknya *gap* akan bernilai negatif (-) jika capaian kinerja lebih kecil dari target kinerja.

Pendekatan *gap* analysis atau analisis kesenjangan bermanfaat untuk:

1. Menilai tingkat kesenjangan antara capaian kinerja dengan target yang ditetapkan.
2. Mengetahui tingkat peningkatan kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangan tersebut.
3. Menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan terkait prioritas waktu dan biaya yang dibutuhkan

Langkah-langkah yang dilakukan dalam *gap analysis*:

1. Identifikasi kondisi aktual dan capaian kinerja.
2. Melakukan analisis kesenjangan dengan membandingkan capaian kinerja dengan target kinerja.
3. Reviu permasalahan faktor pendorong dan faktor penghambat dengan menggunakan statistik deskriptif, yaitu dengan melakukan analisis permasalahan berdasarkan besar atau kecilnya *gap*.
4. Menyusun desain pemecahan masalah apabila *gap* bernilai negatif
5. Menentukan tindak lanjut yang diperlukan.



Dalam rangka memberikan informasi yang kredibel dan bermanfaat maka evaluasi Renja Perangkat Daerah harus didukung oleh data dan informasi yang akurat dan *up to date*. Mekanisme pengumpulan data menggunakan penelaahan dokumen, data survei yang dilakukan secara mandiri oleh Perangkat Daerah maupun lembaga lain yang berkompeten, seperti BPS, lembaga riset dan sebagiannya.

BAB II

CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2025

II.1. Capaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025 TriBulan II disajikan sebagaimana tabel berikut:

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian
	Meningkatnya Ketentraman dan Keteriban Umum dan Penegakan Perda		Persentase meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Perda	95 %	54 %	56 %
		Meningkatnya penanganan gangguan trantibum	Persentase Penanganan gangguan Trantibum yang tertangani	95 %	30%	31 %
		Meningkatnya Penegakan Perda yang tertangani	Persentase Pelanggaran Perda yang tertangani	95 %	24 %	25 %

Analisis capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025, merupakan hasil pelaksanaan program /kegiatan bulan April sampai dengan Juni 2025. Capaian kinerja yang diukur pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran strategis meningkatnya penanganan gangguan trantibum dengan indikator kinerja Prosentase Penanganan gangguan Trantibum yang tertangani dengan formulasi penghitungan Jumlah Penanganan Gangguan Trantibum yang tertangani : Jumlah gangguan Trantibum X 100 % menggambarkan seberapa besar Penanganan Gangguan Trantibum Tahun 2025 yang ditangani. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, gangguan Trantibum yang dapat ditangani sebanyak 30 % dari target 95 % per tahun yang ditentukan pada restra Perangkat Daerah sehingga capaian kinerja pada sasaran I di Tribulan satu 31 %.
2. Sasaran meningkatnya Penegakan Perda yang tertangani dengan indikator kinerja prosentase Pelanggaran Perda yang Tertangani dengan formulasi penghitungan Jumlah Penanganan Perda yang tertangani : Jumlah seluruh Pelanggaran Perda X 100 % dengan target 95 % per tahun yang ditentukan pada renstra Perangkat Daerah terealisasi 24 % pada TB II, sehingga capaian kinerja pada Sasaran 2 di Tribulan satu 25 %.

II.2. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

No.	Program	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	**NILAI SAKIP SATPOL PP**	**380**	**117**	**30 %**
	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu**	**11 Dokumen**	**6 Dokumen**	**54 %**
	Penyusunan Dukumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	2 Dokumen	33 %

	Koordinasi dan Penyusunan Dukumen RKA SKPD	Jumlah Dukumen RKASKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1 dok	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Dukumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dok	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capain Kinerja dan iktisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	1 dok	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dok	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Penatausahaan yang disusun secara tepat waktu**	**72 dokumen**	**45 dok**	**62 %**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 orang	45orang	86 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Dokumen	0 Dok	0%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/tribulan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulana/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	0 dok	0 %
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Darrah		**-**	**-**	**Recofusing**
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	Recofusing
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia**	**162**	**36**	**22 %**
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 Paket	2 Paket	50 %
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3 Paket	1 Paket	33 %

	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3 Paket	1 Paket	33 %
	Penyediaan bahan bacaan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang –Undangan yang disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan tamu	36Laporan	0	0 %
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	108 Laporan	27 Laporan	25 %
	Penatausahaan arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinas Pada SKPD	7 Dokumen	4 dok	57 %
	Kegiatan Pengadaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan**	**2**	**0**	**0 %**
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	**-**	**-**	Recofusing
	Pengadaan Mebel		**-**	**-**	Recofusing
	Pengadaan peralatan dan mesin lainya	Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2	0	0 %
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dibayarkan tepat waktu**	**5 jenis**	**3 Jenis**	**50 %**
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1laporan	1laporan	100 %
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	jumlah Lporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Listrik yang disediakan	2laporan	2laporan	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	2 laporan	1 lap	50%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah dan Jenis barang milik daerah dalam kondisi baik**	**39 unit**	**9 unit**	**25 %**
	Penyediaan jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	1 Unit	100%

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	6 unit	16 %
	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor yang terawat	2	2	100 %
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum yang tertangani**	**1854 dok**	**221**	**12 %**
	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	**Jumlah Kasus gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang tertangani**	**1744**	**221**	**12 %**
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	9 dok	3 dok	33 %
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya Dokumen yang memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertertiban Umum	44 dok	3 dok	7 %
	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam teknik Pencegahan Kejahatan	454 dok	98 dok	21 %
	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	11 dok	11 dok	100 %

	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP fungsional dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	3 0rang	0	0%
	Peningkatan Kapaditas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat		-	-	Recofusing
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah laporan penindakan gangguan trantibum berdasarkan perda dan perkaa melalui penertiban dan penangganan unjuk rasa dab kerusuhan masa	-	-	Recofusing
	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawalan	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli Pengamanan terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengamanan dan Pengawalan	500 lap	99 lap	20 %
	Penindakan Gangguan Ketentraman an Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan unjuk rasa dan Kerusuhan massa yang dilakukan Penindakan	90 lap	7 lap	8 %
	Penyediaan Layanan alam rangka dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah layanan penyediaan layanan dampak penegakan Perda dan Perkada yang terlayani	25 lap	0	0 %

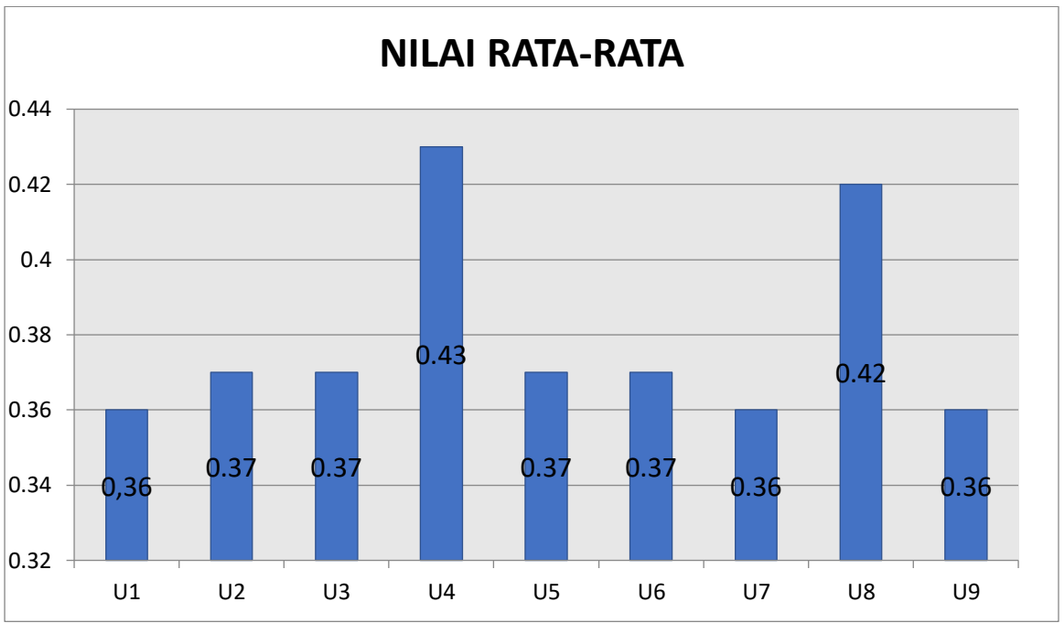
	Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum yang tersedia	1 unit	0	0 %
	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	**Jumlah Pelanggaran Perda yang tetangani**	**99**	**0**	**0 %**
	Pembinaan dan penyuluhan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggaran Peratura Kepala Daerah	2 laporan	0	0 %
	Penyelidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	20 laporan	12	60 %
	Dukungan pelaksanaan sidang atas pelanggaran peraturan daerah	Jumlah Perkara yang dapat disidangkan	-	-	Recofusing
	Pemberkasan Administrasi penyidik oleh PPNS penegak Perda	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyelidikan atas Pelanggaran Perda	-	-	Recofusing
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada masyarakat/Kelompok masyarakat/Pelaku Usaha	5 laporan	0	0 %
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan	22 laporan	3	0,01 %
	Pengawasan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	45 laporan	8	14 %
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	**Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)**	**-**	**-**	**recofusing**

	Pembentukan secretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	-	-	recofusing
	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	-	-	recofusing
	Pembentukan PPNS penegak perda	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	-	-	recofusing
	Dukungan Operasional sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	-	-	recofusing
	Pengembangan Kapasitas dan karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapitas Pejabat PPNS Penegak Perda	-	-	recofusing

Dalam Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indek Kinerja Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, yang ditargetkan pada tahun 2025 sebesar 100 % dengan kategari sangat baik pada Tribulan II telah terealisasi 85,25 % dengan katogori baik dan dari 137 responden maka diperoleh prosentase capaian sebesar 85,25 %

No	Indikator Kinerja	Twiwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1.	Hasil survey KEPUASAN masyarakat (SKM)	84,46	85,25		

Capaian Indek Kinerja Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tribulan II



Ketengan :

U1 : Persyaratan

U2 : Sistem, Mekanisme, Prosedur

U3 : Waktu Penyelesaian

U4 : Biaya/Tarif

U5 : Produk Spesifikasi Jenis Layanan

U6 : Kompetensi Pelaksana

U7 : Prilaku Pelaksana

U8 : Sarana dan Prasarana

U9 : Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan

Dari ke 9 Unsur IKM diatas, posisi kinerja pelayanan terendah ada pada U3 dan U9 (Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan) Dari analis tersebut maka diperlukan rencana tindak lanjut dalam perbaikan unsur pelayanan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk antara lain :

1. Meningkatkan Komunikasi dengan masyarakat pengguna layanan dan mengoptimalkan Koordinasi dengan perangkat daerah terkait dengan penanganan pengaduan yang terjadi di masyarakat
2. Mempermudah persyaratan yang diberikan pada pengguna layanan dan memaksimalkan penggunaan Website dan Sosmed
3. Memudahkan system, mekanisme dan prosedur dalam laporan pengaduan dan penanganan pengaduan
4. Meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat pengguna layanan.

Pencapaian Program tersebut didukung oleh kegiatan antara lain:

Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sebanyak 16 dokumen antara lain:

1. Dokumen LKjIP tahun 2024
2. Dokumen LPPD
3. Dokemen LKPJ
4. Dokumen Renja 2026
5. Dokumen Perubahan Renja 2025
6. Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi TB I

7. Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi TB II
8. Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi TB III
9. Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi TB IV
10. Dukumen SPM
11. Dokumen SAKIP
12. Dokumen PUG
13. Renstra 2025-2030
14. Dokumen Laporan Keuangan
15. Dokumen Laporan Tribulan
16. Dokumen Evaluasi Internal

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah , dengan keluaran Jumlah Dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun yaitu sebanyak 30 , Dokumen administrasi Gaji dan Tunjangan ASN Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk.

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan keluaran, Jumlah Penyediaan komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor, Penyediaan barang Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan , Penyediaan Bahan Bacaan Perundang undangan, Fasilitasi Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD serta Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan keluaran Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan keluaran Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sebanyak 3 jenis antara lain Jasa Surat Menyurat, Sumber daya Air, Listrik dan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Kegiatan Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan dengan Keluaran Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Jabatan serta Penyediaan Jasa Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Dalam Pelaksanaan Tugas yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk mendukung 2 Sasaran yang ingin dicapai didudukung oleh
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Outcome Persentase Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang tertangani dengan beberapa Sub Kegiatan yang dilaksanakan Pada TB II tahun 2025 adalah :
Kegiatan A : Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam satu (1) Daerah Kabupaten /Kota dengan menyesuaikan anggaran recufusing sesuai dengan Keputusan Presiden No 1 Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Koordinasi Trantibum Kabupaten/Kota yang ada Di wilayah Provinsi Jawa Timur serta Satpol PP Provinsi untuk meningkatkan Penyelenggaran Trantibum di Daerah, Kegiatan ini di anggarkan Rp. 5.591.250,- dan teralisasi Rp. 2.123.000 atau sekitar 38 %
2. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Peningkatan SDM Linmas di Tingkat Kecamatan peserta dari masing masing Desa di seluruh kecamatan .Dianggarkan sebesar Rp. 66.271.300,- dan teralisasi Rp. 4.800.000 atau sekitar 7 %.
3. Kerjasama Antar Lembaga dan kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Penanganan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka kemitraan dengan Dinas Samping Polres, Kodim , Kejaksaan, CPM untuk menjaga Penanganan Gangguan Trantibum. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.311.166.350,- dan teralisasi Rp. 359.719.175,- atau sekitar 27 %.
4. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Kententraman Masyarakat kegiatan ini dilaksanakan untuk melaksanakan Kegiatan Lembur Pembuatan SOP Trantibum dan Penegakan Perda. Kegiatan ini dianggarakan sebesar RP. 3.500.000,- dan terealisasi Rp. 2.900.000,-atau sekitar 83 %
5. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP Fungsional dan uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan SDM Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka Penjenjangan Karier. (Recufusing)
6. Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan Perpindahan jabatan ke jabatan Fungsional Pol PP , Promosi dan kenaikan Jenjang Jabatan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung Karier bagi fungsional Satpol PP yang sudah memenuhi persyaratan untuk pengalihan jabatan Fungsional yang lebih tinggi. Kegiatan ini di anggarkan sebesar Rp. 14.460.000,- dan terealisasi 0 atau sekitar 0 %
7. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan SDM Satuan Perlindungan Masyarakat dalam rangka membantu ketentraman dan ketertiban Umum yang ada di masyarakat , serta penanggulangan bencana. (Recufusing)
8. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Satpol PP dan Satlinmas Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas dalam rangka Pengamanan Ketentraman dan Ketertiban Umum. (Recufusing)

9. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini cegah dini, Pembinaan, Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli dan Pengamanan kegiatan ini dilaksanakan untuk antisipasi Ketentraman dan Ketertiban umum dengan kegiatan Patroli Wilayah di daerah rawan gangguan trantibum yang ada dikabupaten Nganjuk, serta Pengamanan dan Pengawalan Bupati dan Pejabat Negara lainnya serta pengamanan asset Daerah, dan Pembayaran Gaji Tenaga Kontrak. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 665.900.300,- terealisasi sebesar Rp 273.808.650,- atau sekitar 41 %
10. Penindakan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban Unjuk rasa dan kerusuhan massa. Kegiatan ini dilaksanakan untuk Penertiban dan Pelanggaran Perda yang ada di masyarakat sesuai dengan SOP dan tugas Pokok fungsi Satpol PP, serta kegiatan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang berpotensi menggangu Ketentraman dan Ketertiban Umum . Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 88.611.500,- teralisasi sebesar Rp. 21.359.400,- atau sekitar 24 %.
11. Penyediaan Layanan dalam rangka dampak Penegakan Perda
    Kegiatan ini dilaksanakan untuk Pemberian bantuan kepada warga yang terdampak akibat dari Penegakan Hukum, Radius 50 m dari tempat kejadian Penegakan Perda. Di di anggarkan sebesar Rp. 2.500.000,- dan teralisasi Rp. 0 atau 0 %
12. Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi sarana dan prasarana trantibum dimana Satuan Polisi Poamong Praja sebagai garda terdepan Penegakan Perda masih banyak sapras yang belum sesuai dengan amanat Permendagri No 121 Tahun 2018 tentang STANDAR TEKNIS MUTU PELAYANAN DASAR SUB URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM . Dianggarkan sebesar Rp. 119.829.000 dan teralisasi Rp.0 atau 0 %.

Kegiatan B : Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota

Sub Kegiatan :

1. Pembinaan dan Penyuluhan terhadap pelanggaran Peraturan Derah dan Peraturan Kepala Daerah kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan Pembinaan serta Penyuluhan kepada masyarakat pelanggar perda, pada waktu pelaksanaan operasi Pelanggaran Perda berlangsung. Kegiatan ini di anggarkan sebesar Rp. 5.060.000 dan terealisasi Rp. 0 atau 0 %.
2. Penyelidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah kegiatan ini dilaksanakan untuk pemberkasan pelanggaran Perda , Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000,- dan terealisasi 6.000.000 atau 60 %..
3. Dukungan pelaksanaan sidang atas pelangaran Peraturan Daerah kegiatan ini dilaksanakan untuk pemberkasan penyidikan kepada masyarakat pelanggar Perda yang akan diberikan saksi. (Recufusing)

4. Pemberkasan administrasi penyidik pegawai oleh PPNS Penegak Perda kegiatan ini di laksanakan untuk untuk melakukan lembur dalam rangka pemberkasan kepada warga masyarakat pelanggar Perda. (Recufusing)
5. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan wawasan dan pemahaman kepada warga masyarakat ketentuan perundang-undangan baik tentang Ketertiban, Kebersihan, Keindahan (K3) . Kegiatan ini di anggarkan sebesar Rp. 332.041.850,- dan terealisasi 0 atau 0 %
6. Penanganan Atas Pelanggaran Kepatuhan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota

   Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Penangan Pelanggaran Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Pelanggar Perda. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 578.805.000,- terealisasi Rp. 80.226.000,- atau sekitar 14 %.
7. Pengawasan atas kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

   Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberiakan Pengawasan Kepada masyarakat Pelanggar Perda atau Badan Usaha, sehingga tidak lagi muncul kegiatan yang sama dengan pelaku yang sama. Dianggarkan sebesar Rp. 31.007.800,- dan teralisasi sebesar Rp. 14.625.000,- atau sekitar 48 %

Kegiatan C : Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Sub Kegiatan :

1. Pembentukan secretariat PPNS kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung Pelaksanaan kegiatan Pelanggaran Perda yang dilakukan oleh masyarakat (Recufusing)
2. Kerjasama antar lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah

   Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka kemitraan dengan Dinas luar PPNS Penegak Perda. (Recufusing)
3. Pembentukan PPNS Penegak Perda kegiatan ini dilaksanakan untuk bimbingan Teknis PPNS Penegak Perda . (Recufusing)
4. Dukungan Operasional secretariat PPNS kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan dukungan Operasional PPNS . (Recufusing)
5. Pengembangan kapasitas dan karier PPNS kegiatan ini dilaksanakan untuk mengembangkan kapasitas PPNS. (Recufusing)

BAB III

FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

III.1. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

No.	Tujuan/Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	Tujuan : Meningkatnya Ketentraman dan Keteriban Umum dan Penegakan Perda Sasaran : Meningkatnya penanganan gangguan Trantibum dan Meningkatnya Penegakan Perda yang tertangani	1. Tersedianya Dukungan Anggaran dari APBD 2. Adanya Regulasi daerah yang sesuai dengan situasi dan kondisi daerah terkait dengan tugas pokok dan fungsi 3. Peningkatan Kapasitas dan Jumlah anggota Satpol PP 4. Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai	1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan Peraturan Daerah dan penciptaan Ketentraman dan Ketertiban 2. Belum adanya regulasi yang kuat sesuai dengan situasi dan kondisi daerah terkait dengan tugas pokok dan fungsi

III.2 **Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Pencapaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah**

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan disajikan dalam table berikut :

No.	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	Dukungan Anggran dari APBD	
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	Dukungan Anggran dari APBD	

1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Dukungan Anggran dari APBD	
1.05.01.2.01	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah**	Dukungan Anggran dari APBD	
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dukumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dukungan Anggaran dari APBD	Sistem SIPD yang terlalu sering mengalami down grade
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dukumen RKA SKPD	Dukungan Anggaran dari APBD	Hanya dapat mengakses SIPD pada malam hari s/d dini hari
1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dukumen Perubahan RKA SKPD	Dukungan Anggaran dari APBD	Sering mengalami perubahan Versi sehingga perlu penyesuaian kembali terhadap Aplikasi yang telah diperbaharui atau diganti
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capain Kinerja dan iktisar realisasi Kinerja SKPD	Dukungan Anggaran dari APBD	Sistem Pada DUBB yang belum Optimal sehingga data yang sudah dimasukan tidak tersimpan
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan Anggaran dari APBD	Sistem Pada DUBB yang belum Optimal sehingga data yang sudah dimasukan tidak tersimpan
1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Dukungan Anggaran dari APBD	

1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dukungan Anggaran dari APBD	Sistem Aplikasi SIPD yang lemot,akses bisa sering pada malam hari
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dukungan Anggaran dari APBD	SIPD sering mentenen
1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/tribulan/semesteran SKPD	Dukungan Anggaran dari APBD	SIPD sering mentenen
1.05.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Dukungan Anggaran dari APBD	
1.05.01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dukungan Anggaran dari APBD	Kesulitan mencari Penyedia yang barangnya ber TKDN
1.05.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Dukungan Anggaran dari APBD	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya anggaran dari APBD	Proses pengadaan barang sesuai di E-katolog
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya anggaran dari APBD	Terjadi eroor pada Sistem E-katolog
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Tersedianya anggaran dari APBD	Penyediaan barang disesuaikan E-katalog
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan bahan bacaan Perundang-undangan	Tersedianya anggaran dari APBD	Banyaknya beredar media yang muncul saat ini pada Metsos
1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi kunjungan tamu	Tersedianya anggaran dari APBD	Jumlah dan waktu kehadiran tamu yang tidak dapat direncanakan

1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Tersedianya anggaran dari APBD	Pelaksanaan kegiatan yang tidak mudah untuk direncanakan
1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan arsip Dinamis pada SKPD	Tersedianya anggaran dari APBD	- Terbatasnya lokasi penyimpanan arsip - Belum adanya petugas kearsipan
1.05.01.2.07	**Kegiatan Pengadaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya anggaran dari APBD	
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya anggaran dari APBD	Kesulitan mencari Penyedia yang barangnya ber TKDN
1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya anggaran dari APBD	
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan peralatan dan mesin lainya	Tersedianya anggaran dari APBD	Proses pengadaan yang harus disesuaikan dengan E-katalog
1.05.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Aplikasi Srikandi	Sering Terjadi eroor pada Sistem Srikandi
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan Listrik	Tersedianya Anggaran dari APBD	Sering nya WAFI lemot sehingga menganggu kinerja
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya anggaran dari APBD	Penyediaan jasa yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku

1.05.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya anggaran dari APBD	Penyediaan barang/jasa sesuai dengan E-katalog
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya anggaran dari APBD	Penyediaan barang/jasa sesuai dengan E-katalog
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya anggaran dari APBD	Penyediaan barang/jasa sesuai dengan E-katalog
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Dukungan Anggaran dari APBD	
1.05.02.2.01	**Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten**	Dukungan Anggaran dari APBD	
1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dukungan Anggaran dari APBD	NIHIL / Tidak ada Faktor Penghambat
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Peningkatan Pengetahuan bagi Anggota Linmas	Belum semua Anggota Linmas dapat tersasar kegiatan tsb dikarenakan terbatasnya Anggaran

1.05.02.2.01.0006	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan Penanganan gangguan Trantibum dapat dilaksanakan dengan maksimal dengan dukungan dari dinas samping	Kerjasama yang dilaksanakan selama ini hanya terkait dengan gangguan trantibum belum pada kerjasama terkait dengan Penanganan Pelanggaran Perda
1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Untuk Kelancaran Pelaksanaan TUPOKSI	Penyusunan SOP belum maksimal karena SDM
1.05.02.2.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP fungsional dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Peningkatan SDM	Kurang minat anggota
1.05.02.2.01.0012	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perindahan jabatan ke jabatan Fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	Peningkatan SDM	Nihil
1.05.02.2.01.0013	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Dukungan Anggaran APBD	Dukungan Anggaran yang minim
1.05.02.2.01.0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Satpol PP dan Satlinmas	Dukungan Anggaran APBD	Dukungan Anggaran yang minim
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli , Pengamanan dan Pengawalan	Dukungan Anggaran APBD	Kurangnya SMD sehingga Kegiatan Patroli Wilayah tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP

1.05.02.2.01.0016	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penangan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Dukungan Anggaran APBD	Masih Banyaknya Masyarakat Pelanggar Perda terkait dengan Anjal gepeng,miras dan PSK
1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Tersedianya Anggaran pada APBD	Belum semua masyarakat paham terkait Dampak Penegakan Perda
1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Tersedianya Anggaran pada APBD	
1.05.02.2.02	**Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**		
1.05.02.2.02.004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Tersedianya Anggaran pada APBD	Banyak Pelanggar Perda yang ada di Kab. Nganjuk
1.05.02.2.02.007	Penyelidikan terhadap Pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Tersedianya Anggaran pada APBD	
1.05.02.2.02.008	Dukungan pelaksanaan sidang atas pelanggaran peraturan daerah	Tersedianya Anggaran pada APBD	
1.05.02.2.02.009	Pemberkasan Administrasi penyidik oleh PPNS penegak perda	Tersedianya Anggaran pada APBD	
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Peraturan Bupati/Walikota	Tersedianya Anggaran pada APBD	Belum semua masyarakat dan pelaku usaha tersasar kegiatan tsb
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Tersedianya Anggaran APBD	Kurangnya PPNS Penegak Perda
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/walikota	Tersedianya Anggaran APBD	Masih banyaknya Pelanggar Perda dari Pelaku Usaha

1.05.02.2.03	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**		
1.05.02.2.03.0002	Pembentukan secretariat PPNS	Dukungan Anggaran APBD	SDM
1.05.02.2.03.0003	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Dukungan Anggaran APBD	SDM
1.05.02.2.03.0004	Pembentukan PPNS Penegak Perda	Dukungan Anggaran APBD	-
1.05.02.2.03.0005	Dukungan Operasional sekretariat PPNS	Dukungan Anggaran APBD	Terbatasnya Sapras
1.05.02.2.03.0003	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Dukungan Anggaran APBD	SDM

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk Tribulan II Tahun 2025 antara lain:

1. Sebanyak 2 (dua) Indikator Kinerja yang telah dilakukan pengukuran pada Tribulan II untuk capain kinerja pada indikator Persentase Penanganan gangguan Trantibum yang tertangani Target tahunan yang ditentukan 95 %, dan TB II teralisasi 30 %.

2. Untuk Indikator Persentase Pelanggaran Perda yang tertangani dengan target yang Tahunan 95 % TB II terealisasi 24 %

3. Untuk Pelaksanaan Sub Kegiatan Sosialisasi yang dijadwalkan pada TB II, belum bisa dilaksanakan sampai akhir TB II

Capaian realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk s.d. 30 Juni 2025 sebesar Rp 3.915.823.028,- atau 34 % dari pagu anggaran, Rp. 11.643.279.473,- sehingga sisa Anggaran Rp 7.727.456.445 atau 66 % anggaran tersisa.

IV.2 **Tindak Lanjut**

Berkoordinasi dengan ULP terkait dengan Pengadaan Sovenir DBHC HT untuk dimasukkan secara manual di LPSE, untuk Proses SPJ karena barcord tanda tangan E Katalog Pengguna Anggaran belum terbit dari pejabat pengadaan untuk di proses Pengadaan Langsung, per tanggal 6 Juni 2025 barcord E katalog terbit sehingga SPJ beralih untuk Proses E Katalog, SIRUP DBHCHT terbit 16 Mei 2025, Menunggu Aktifnya E Katalog Versi 6.

IV.3 Rekomendasi

Semua Permasalahan yang ada pada TB II untuk segera diselesaikan .

Nganjuk, 30 Juni 2025
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN NGANJUK

SUHARONO, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690905 199003 1 005

LAPORAN EVALUASI TRIBULAN TAHUN 2025

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
													I			II			III			IV											
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14=7+13			15=14/6		16
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dan Penegakan Perda		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		193		42.181.172.193	10.901		12.781.716.275	2.234		11.643.279.473	196		1.312.124.374										482		3.915.823.028	11.383		16.697.539.303	5893,35	39,59	Satuan Polisi Pamong Praja
		1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Nilai Sakip**	**93,15**	**Nilai**	**32.376.157.773**	**259**	**Nilai**	**7.066.311.191**	**380**	**Nilai**	**8.408.535.123**	**75**	**Nilai**	**1.135.718.644**	**90**	**Nilai**	**2.014.543.159**	**0**	**Nilai**	**0**	**0**	**Nilai**	**0**	**117**	**Nilai**	**3.150.261.803**	**376**	**Nilai**	**10.216.572.994**	**403,65**	**31,56**	**Satuan Polisi Pamong Praja**

		1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Penatausahaan Sub Kegiatan yang disusun secara tepat waktu**	**73**	**Dokumen**	**26.348.317.500**	**73**	**Dokumen**	**5.819.238.843**	**72**	**Dokumen**	**7.234.434.413**	**45**	**Dokumen**	**1.034.410.345**	**45**	**Dokumen**	**1.760.424.854**	**0**	**Dokumen**	**0**	**0**	**Dokumen**	**0**	**45**	**Dokumen**	2.794.835.199	118	**Dokumen**	**8.614.074.042**	**161,64**	**32,69**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
		1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53	orang/bulan	26.320.650.000	53	orang/bulan	5.809.050.843	52	orang/bulan	7.226.302.413	45	orang/bulan	1.034.410.345	45	orang/bulan	1.760.424.854		orang/bulan	0	0	orang/bulan	0	45	orang/bulan	2.794.835.199	98	orang/bulan	8.603.886.042	184,91	32,69	Satuan Polisi Pamong Praja
		1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan	13.020.000	2	Laporan	4.961.000	2	Laporan	4.020.000	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	Laporan	-	2	Laporan	4.961.000	100,00	38,10	Satuan Polisi Pamong Praja
		1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	Laporan	14.647.500	18	Laporan	5.227.000	18	Laporan	4.112.000	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	Laporan	-	18	Laporan	5.227.000	100,00	35,69	Satuan Polisi Pamong Praja

		1.05.01.2.01	**Perencanaan Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun secara tepat waktu**	**16**	**Dokumen**	**120.120.000**	**13**	**Dokumen**	**36.848.000**	**11**	**Dokumen**	**18.700.000**	**6**	**Dokumen**	**5.496.000**		**Dokumen**	**5.820.000**	**0**	**Dokumen**	**0**	**0**	**Dokumen**		6	**Dokumen**	11.316.000	19	**Dokumen**	48.164.000	**118,75**	**40,10**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
		1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dukumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dokumen	29.120.000	6	Dokumen	5.115.000	6	Dokumen	8.856.000	2	Dokumen	2.320.000	2	Dokumen	3.040.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	2	Dokumen	5.360.000	8	Dokumen	10.475.000	133,33	35,97	Satuan Polisi Pamong Praja
		1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dukumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	10.920.000	1	Dokumen	6.599.500	1	Dokumen	2.928.000	1	Dokumen	888.000	1	Dokumen	480.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	1	Dokumen	1.368.000	2	Dokumen	7.967.500	200,00	72,96	Satuan Polisi Pamong Praja
		1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dukumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	10.920.000	1	Dokumen	5.842.000	1	Dokumen	1.704.000	0	Dokumen	-	1	Dokumen	1.400.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	1	Dokumen	1.400.000	2	Dokumen	7.242.000	200,00	66,32	Satuan Polisi Pamong Praja

		1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	12.740.000	1	Dokumen	2.292.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	-	1	Dokumen	2.292.000	100,00	17,99	Satuan Polisi Pamong Praja
		1.05.1.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	Dokumen	12.740.000	1	Dokumen	2.292.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen			Dokumen		0	Dokumen	-	1	Dokumen	2.292.000	50,00	17,99	Satuan Polisi Pamong Praja
		1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	14.560.000	2	Laporan	5.485.500	2	Laporan	2.276.000	2	Laporan	1.596.000	2	Laporan	630.000		Laporan			Laporan		2	Laporan	2.226.000	4	Laporan	7.711.500	200,00	52,96	Satuan Polisi Pamong Praja
		1.05.1.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	29.120.000	1	Laporan	9.222.000	1	Laporan	2.936.000	1	Laporan	692.000	1	Laporan	270.000	0	Laporan	0	0	Laporan		1	Laporan	962.000	2	Laporan	10.184.000	200,00	34,97	Satuan Polisi Pamong Praja

		1.05.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Pegawai yang difasilitasi Pakaian Dinas**	**86**	**Paket**	**152.323.200**	**0**	**Paket**	**0**	**86**	**Paket**	**-**	**-**	**Paket**	**-**		**Paket**	**-**	**0**	**Paket**	**0**		**Paket**	**0**	0	**Paket**	-	0	**Paket**	-	**0,00**	**0,00**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
		1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	86	Paket	152.323.200	0	Paket	0	86	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	0	0	Paket	0	0	Paket	-	0	Paket	-	0,00	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia**	**199**	**Paket**	**2.038.400.000**	**135**	**Paket**	**493.222.040**	**162**	**Paket**	**347.136.910**	**15**	**Paket**	**30.556.750**	**36**	**Paket**	**100.540.950**	**0**	**Paket**	**0**	**0**	**Paket**	**0**	51	**Paket**	131.097.700	186	**Paket**	624.319.740	**93,47**	**30,63**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
		1.05.01.2.06.0001	Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4	Paket	21.840.000	4	Paket	7.965.000	4	Paket	7.182.660	0	Paket	-	2	Paket	3.709.800	0	Paket	0	0	Paket	0	2	Paket	3.709.800	6	Paket	11.674.800	150,00	53,46	Satuan Polisi Pamong Praja
		1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	637.000.000	3	Paket	97.041.540	3	Paket	86.526.050	2	Paket	10.117.000	1	Paket	42.300.600	0	Paket	0	0	Paket	0	3	Paket	52.417.600	6	Paket	149.459.140	200,00	23,46	Satuan Polisi Pamong Praja
		1.05.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket	36.400.000	3	Paket	9.929.500	3	Paket	6.997.200	1	Paket	1.095.750	1	Paket	1.953.250	0	Paket	0	0	Paket	0	2	Paket	3.049.000	5	Paket	12.978.500	166,67	35,66	Satuan Polisi Pamong Praja

		1.05.01.2.06.0006	Penyediaan bahanbacaan perundang-undangan	Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undanganyang Disediakan	5	Dokumen	36.400.000	5	Dokumen	2.352.000	1	Dokumen	2.400.000	1	Dokumen	392.000	1	Dokumen	588.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	1	Dokumen	980.000	6	Dokumen	3.332.000	120,00	9,15	Satuan Polisi PamongPraja
		1.05.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36	Laporan	87.360.000	35	Laporan	22.222.500	36	Laporan	24.200.500	2	Laporan	1.890.000	0	Laporan	-	0	Laporan	0	0	Laporan	0	2	Laporan	1.890.000	37	Laporan	24.112.500	102,78	27,60	Satuan Polisi Pamong Praja
		1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	108	Laporan	1.183.000.000	78	Laporan	344.921.000	108	Laporan	211.610.750	9	Laporan	17.062.000	27	Laporan	47.283.300	0	Laporan	0	0	Laporan	0	36	Laporan	64.345.300	114	Laporan	409.266.300	105,56	34,60	Satuan Polisi Pamong Praja
		1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7	Dokumen	36.400.000	7	Dokumen	8.790.500	7	Dokumen	8.219.750	0	Dokumen	-	4	Dokumen	4.706.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	4	Dokumen	4.706.000	11	Dokumen	13.496.500	157,14	37,08	Satuan Polisi Pamong Praja
		1.05.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan**	**4**	**Jenis**	**4.113.200.000**	**2**	**Jenis**	**91.150.000**	**5**	**Jenis**	**0**	**0**	**Jenis**	**-**	**0**	**Jenis**	**-**	**0**	**Jenis**	**0**	**0**	**Jenis**	**0**	**0**	**Jenis**	**0**	2	**Jenis**	91.150.000	**50,00**	**2,22**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
		1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	Unit	1.019.200.000	2	Unit	91.150.000	2	Unit	0	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	-	2	Unit	91.150.000	200,00	8,94	Satuan Polisi Pamong Praja

		1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	2.912.000.000	0	Unit	0	1	Unit	0	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	-	0	Unit	-	0,00	0,000	Satuan Polisi Pamong Praja
		1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	Paket	182.000.000	0	Paket	0	2	Paket	0	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	0	0	Paket	0	0	Paket	-	0	Paket	-	0,00	0,000	Satuan Polisi Pamong Praja
		1.05.01.2.08	**Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dibayarakan tepat waktu**	**7**	**Laporan**	**629.720.000**	**5**	**Laporan**	**159.363.637**	**5**	**Laporan**	**203.960.000**	**3**	**Laporan**	**11.954.799**		**Laporan**	**26.508.560**	**0**	**Laporan**	**0**	**0**	**Laporan**	**0**	3	**Laporan**	38.463.359	8	**Laporan**	197.826.996	**114,29**	**31,42**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
		1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	10.920.000	1	Laporan	2.993.500	1	Laporan	3.000.000	0	Laporan	-	1	Laporan	1.200.000	0	Laporan	0	0	Laporan	0	1	Laporan	1.200.000	2	Laporan	4.193.500	200,00	38,40	Satuan Polisi Pamong Praja
		1.05.01.2.08.0002	Penyediaan jasakomunikasi sumberdaya air dan listrik	Jumlah LaporanPenyediaan JasaKomunikasi SumberDaya Air dan Listrikyang Disediakan	3	Laporan	400.400.000	2	Laporan	47.772.309	2	Laporan	94.000.000	2	Laporan	10.954.799	2	Laporan	9.308.560	0	Laporan	0	0	Laporan	0	2	Laporan	20.263.359	4	Laporan	68.035.668	133,33	16,99	Satuan Polisi PamongPraja
		1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	218.400.000	2	Laporan	108.597.828	2	Laporan	106.960.000	1	Laporan	1.000.000	1	Laporan	16.000.000	0	Laporan	0	0	Laporan	0	2	Laporan	17.000.000	4	Laporan	125.597.828	33,33	57,51	Satuan Polisi Pamong Praja

		1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah dan jenis barang milik daerah dalam kondisi baik**	**45**	**Unit**	**2.402.400.000**	**31**	**Unit**	**466.488.671**	**39**	**Unit**	**604.303.800**	**6**	**Unit**	**53.300.750**	**9**	**Unit**	**121.248.795**	**0**	**Unit**	**0**	**0**	**Unit**	**0**	**12**	**Unit**	**174.549.545**	43	**Unit**	641.038.216	**95,56**	**26,68**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
		1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	473.200.000	1	Unit	60.807.683	1	Unit	86.586.800	1	Unit	12.310.272	1	Unit	15.936.934		Unit			Unit	0	1	Unit	28.247.206	2	Unit	89.054.889	200,00	18,82	Satuan Polisi Pamong Praja
		1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36	Unit	1.456.000.000	28	Unit	341.887.188	36	Unit	443.038.100	3	Unit	33.247.128	6	Unit	84.508.061	0	Unit	0		Unit	0	9	Unit	117.755.189	37	Unit	459.642.377	102,78	31,57	Satuan Polisi Pamong Praja
		1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	Unit	291.200.000	2	Unit	63.793.800	2	Unit	74.678.900	2	Unit	7.743.350	2	Unit	20.803.800	0	Unit	0	0	Unit	0	2	Unit	28.547.150	4	Unit	92.340.950	200,00	31,71	Satuan Polisi Pamong Praja

		1.5.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	5	Unit	182.000.000	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	-	0	Unit	-	0,00	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		1 .05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangan**	**100**	**persen**	**9.805.014.420**	**10.642**	**persen**	**5.715.405.084**	**1.854**	**persen**	**3.234.744.350**	**121**	**persen**	**176.405.730**	**221**	**persen**	**589.155.495**	**-**	**persen**	**-**	**-**	**persen**	**-**	**365**	**persen**	**765.561.225**	**11007**	**persen**	**6.480.966.309**	**11007,00**	**66,10**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
2	Meningkatnya Penanganan Gangguan Trantibum	**1.05.02.2.01**	**Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten**	**Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum yang tangani**	**10847**	**Kasus**	**9.196.414.374**	**10.577**	**Kasus**	**4.165.025.127**	**1.744**	**Kasus**	**2.277.829.700**	**106**	**Kasus**	**163.430.730**	**221**	**Kasus**	**501.279.495**		**Kasus**			**Kasus**		327	**Kasus**	664.710.225	10904	**Kasus**	4.829.735.352	**100,53**	**52,52**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
		1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	3	Dokumen	100.743.860	3	Dokumen	9.682.500	9	Dokumen	5.591.250		Dokumen		3	Dokumen	2.123.000		Dokumen			Dokumen		3	Dokumen	2.123.000	6	Dokumen	11.805.500	200,00	11,72	Satuan Polisi Pamong Praja

		1.05.02.2.01.0015	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melaui deteksi dini dan cegah dini Pembinaan Penyuluha Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawalan	56	Laporan	2.271.293.800	56	Laporan	849.777.952	500	Laporan	665.900.300	75	Laporan	99.823.460	99	Laporan	173.985.190		Laporan			Laporan		174	Laporan	273.808.650	230	Laporan	1.123.586.602	410,71	49,47	Satuan Polisi Pamong Praja
		1.05.02.2.01.0016	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan perda dan perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	118	Laporan	400.000.000	118	Laporan	39.687.000	90	Laporan	88.611.500	13	Laporan	12.509.600	7	Laporan	8.849.800		Laporan			Laporan		20	Laporan	21.359.400	138	Laporan	61.046.400	116,95	15,26	Satuan Polisi Pamong Praja

		1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20	Dokumen	1.267.500.000	19	Dokumen	1.964.910.000	44	Dokumen	66.271.300	0	Dokumen	0	3	Dokumen	4.800.000		Dokumen			Dokumen		3	Dokumen	4.800.000	22	Dokumen	1.969.710.000	110,00	155,40	Satuan Polisi Pamong Praja
		1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termasuk dalam pelaksanaan tugas Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	90	orang	1.139.738.600	0	orang	0	0	orang	0	0	orang	0		orang			orang			orang		0	orang	-	0	orang	-	0,00	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		1.05.02.2.01.0010	Peningkatankapasitas SDM satuanpolisi pamong prajamelalui penddidikandan pelatihan dasarpol pp fungsional pol pp dan ujikopetensi	jumlah aparatursatpol pp yangmengikuti pendidikandan pelatihan dasarpolisi pamong praja	10	orang	105.000.000	0	orang	0	3	orang	-	0	orang	0		orang			orang			orang		0	orang	-	0	orang	-	0,00	0,00	Satuan Polisi PamongPraja

			penjabatfungsional																															
		1.05.02.2.01.0012	Peningkatan kapasitas SDM Pol PP melalui uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional pol pp promosi dan kenaikan jenjang jabatan	jumlah pejabat fungsional yang mengikuti kompetensi perpindahan jabatan ke jabatan fungsional pol pp promosi dan kenaikan jenjang jabatan	3	orang	22.500.000	0	orang	0	4	orang	14.460.000	0	orang	0		orang			orang			orang			orang			orang			orang			orang		0	orang	-	0	orang	-	0,00	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		1.05.02.2.01.0013	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	jumlah SDM sataun pelindungan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	200	orang	755.169.000	0	orang	0	602	orang	-	0	orang	0		orang			orang			orang			orang			orang			orang		0	orang	-	0	orang	-	0,00	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja

		1.05.02.2.01.0014	Peningkatan kapasitas SDM satuan polisi pamong praja dan satlinmas melalui pelatihan teknis Satpol PP dan SATLINMAS	jumlah angota satpol pp dan satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui teknis satpol pp dan satlinmas	60	orang	90.000.000	0	orang	0	1	orang	-	0	orang	0		orang			orang			orang		0	orang	-	0	orang	-	0,00	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		1.05.02.2.01.0006	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1045	Dokumen	3.902.637.500	1037 1	Dokumen	1.299.000.675	454	Dokumen	1.311.166.350	18	Dokumen	51.097.670	98	Dokumen	308.621.505		Dokumen			Dokumen		116	Dokumen	359.719.175	10487	Dokumen	1.658.719.850	99,45	42,50	Satuan Polisi Pamong Praja
		1.05.02.2.01.0018	Pengadaan Pemeliharaan Saranadan PrasaranaKetentraman danKetertiban Umum	Jumlah Sarana danPrasaranaKetenteraman danKetertiban Umum yangTersedia	1	Unit	76.000.000	0	Unit	0	1	Unit	119.829.000	0	Unit	0		Unit			Unit			Unit		0	Unit	-	0	Unit	-	0,00	0,00	Satuan Polisi PamongPraja

		1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	11	Dokumen	24.500.000	10	Dokumen	1.967.000	11	Dokumen	3.500.000	0	Dokumen	0	11	Dokumen	2.900.000		Dokumen			Dokumen		11	Dokumen	2.900.000	21	Dokumen	4.867.000	190,91	19,87	Satuan Polisi Pamong Praja
		1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga layanan yang terdampak penegakan perda dan perkada yang terlayani	5	Laporan	90.000.000	0	Laporan	0	25	Laporan	2.500.000	0	Laporan	0		Laporan			Laporan			Laporan		0	Laporan	-	0	Laporan	-	0,00	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja

3	Meningkatnya penegakkan perda yang tertangani	**1.05.02.2.02**	**Penegakan Peraturan Daerah kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Jumlah Pelanggaran Perda yang tertangani**	**76**	**Laporan**	**583.000.032**	**63**	**Laporan**	**1.549.559.957**	**99**	**Laporan**	**956.914.650**	**15**	**Laporan**	**12.975.000**		**Laporan**	**87.876.000**	**0**	**Laporan**	**0**	**0**	**Laporan**	**0**	**38**	**Laporan**	**100.851.000**	101	**Laporan**	1.650.410.957	**132,89**	**283,09**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
		1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	5	Laporan	300.000.000	5	Laporan	598.560.000	5	Laporan	332.041.850	0	Laporan	0		Laporan			Laporan			Laporan		0	Laporan	-	5	Laporan	598.560.000	100,00	199,52	Satuan Polisi Pamong Praja
		1.05.02.2.02.004	Pembinaan dan penyuluhan terhadap pelangar peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	jumlah laporan hasil pembinaan dan penyuluhan atas pelanggar peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	5	Laporan	48.700.000	0	Laporan	0	2	Laporan	5.060.000	0	Laporan	-		Laporan			Laporan			Laporan		0	Laporan	-	0	Laporan	-	0,00	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja

		1.05.02.2.02.0012	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	46	Laporan	160.500.000	33	Laporan	40.800.000	46	Laporan	31.007.800	14	Laporan	9.375.000	8	Laporan	5.250.000		Laporan			Laporan		22	Laporan	14.625.000	55	Laporan	55.425.000	119,57	34,53	Satuan Polisi Pamong Praja
		1.05.02.2.02.0009	Pemberkasan administrasi penyidik oleh PPNS penegak peraturan daerah	jumlah dokumen pemberkasan hasil penyidikan atas pelanggaran perda	5	Dokumen	28.500.000	0	Dokumen	0	2	Dokumen	-	0	Dokumen	-		Dokumen			Dokumen			Dokumen		0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0,00	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		1.05.02.2.02.0011	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	25	Laporan	122.500.000	25	Laporan	910.199.957	22	Laporan	578.805.000	1	Laporan	3.600.000	3	Laporan	76.626.000		Laporan			Laporan		4	Laporan	80.226.000	29	Laporan	990.425.957	116,00	808,51	Satuan Polisi Pamong Praja

		1.05.02.2.02.0007	Penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	jumlah laporan hasil peyelidikan atas dugaan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	4	Laporan	39.600.000	0	Laporan	0	20	Laporan	10.000.000	0	Laporan	0	12	Laporan	6.000.000		Laporan			Laporan		12	Laporan	6.000.000	12	Laporan	6.000.000	300,00	15,15	Satuan Polisi Pamong Praja
		1.05.02.2.02.0008	Dukungan pelaksanaan sidang atas pelanggaran peraturan daerah	jumlah perkara yang dapat disidangkan	2	Laporan	28.000.000	0	Laporan	0	2	Laporan	-	0	Laporan	0		Laporan			Laporan			Laporan		0	Laporan	-	0	Laporan	-	0,00	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		1.05.02.2.03	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten / Kota**	**Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)**	**27**	**Laporan**	**161.440.000**	**2**	**Laporan**	**820.000**	**11**	**Laporan**	-	**0**	**Laporan**	**0**	**0**	**Laporan**	-	**0**	**Laporan**	**0**	**0**	**Laporan**	**0**	**0**	**Laporan**	**0**	2	**Laporan**	820.000	**7,41**	**0,51**	**Satuan Polisi Pamong Praja**
		1.05.02.2.03.0002	Pembentukan sekretariat PPNS	Surat keputusan kepala daerah tentang pembentukan sektretariat PPNS	15	Dokumen	7.200.000	0	Dokumen	0	3	Dokumen	-	0	Dokumen	0		Dokumen			Dokumen			Dokumen		0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0,00	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja

		1.05.02.2.03.0003	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah	jumlah dokumen hasil pelaksanaan kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah	3	Dokumen	25.600.000	2	Dokumen	820.000	3	Dokumen	0	0	Dokumen	0		Dokumen			Dokumen			Dokumen		0	Dokumen	-	2	Dokumen	820.000	66,67	3,20	Satuan Polisi Pamong Praja
		1.05.02.2.03.0004	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	3	Laporan	70.640.000	0	Laporan	0	1	Laporan	-	0	Laporan	0		Laporan			Laporan			Laporan		0	Laporan	-	0	Laporan	-	0,00	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		1.05.02.2.03.0005	Dukungan Operasional sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	2	Laporan	44.000.000	0	Laporan	0	2	Laporan	-	0	Laporan	0		Laporan			Laporan			Laporan		0	Laporan	-	0	Laporan	-	0,00	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan peningkatan kapasitas pejabat PPNS Penegak Perda	4	Laporan	14.000.000	0	Laporan	0	2	Laporan	-	0	Laporan	0		Laporan			Laporan			Laporan		0	Laporan	-	0	Laporan	-	0,00	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja